

Memperkuat Integritas Pemilih dan Ketahanan terhadap Politik Transaksional dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Palangka Raya

**Bismar Harris Satriawan*¹, Dian Iskandar², Mochamad Doddy Syahirul Alam³,
Ummu Habibah Gaffar⁴**

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya,
Indonesia

⁴Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangka Raya,
Indonesia

*e-mail: satriawanhb@gmail.com¹

Abstrak

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian kelompok akademisi atas disrupsi budaya politik yang sedang terjadi dalam proses demokrasi elektoral saat ini. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dalam program dosen pendamping pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini dipilih sebagai salah satu wilayah di Kota Palangka Raya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Kota Palangka Raya. Program pengabdian dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang. Hasil kegiatan ini adalah optimalisasi pencegahan dan meminimalisir terjadinya politik transaksional/ politik uang, membentuk rasionalitas pemilih, serta membuka ruang lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas melalui ide/kinerja yang dimiliki dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

Kata kunci: Integritas, Pemilihan Kepala Daerah, Pemilih Rasional, Politik Transaksional

Abstract

This community empowerment activity is a form of concern from academic groups regarding the political cultural disruption that is currently occurring in the current electoral democracy process. This activity was carried out in the accompanying lecturer program for community empowerment through political education activities in Menteng, Jekan Raya District, Palangka Raya City, Central Kalimantan Province. This location was chosen as one of the areas in Palangka Raya City with the largest Registered Voters (DPT) in Palangka Raya City. This program is implemented through 3 (three) stages, namely the preparation stage, implementation stage and evaluation stage. This activity aims to strengthen voter integrity and resistance to transactional politics/money politics. The results of this activity are optimizing prevention and minimizing the occurrence of transactional politics/money politics, forming voter rationality, as well as opening up space for the birth of leaders who have integrity and quality through the ideas/performance they have in the Regional Head Election for Governor and Vice Governor of Central Kalimantan Province and the Mayor election. Palangka Raya in 2024.

Keywords: Integrity, Transactional Politics, Regional Head Election, Rational Voter

1. PENDAHULUAN

Saat ini indeks demokrasi Indonesia masih berada pada level flawed democracy, salah satu permasalahannya adalah terjadinya disrupsi budaya politik dalam proses demokrasi elektoral (The Economist Intelligence Unit/EIU, 2022). Disrupsi demokrasi adalah bagaimana nilai-nilai demokrasi terdegradasi akibat munculnya berbagai permasalahan dalam proses demokrasi elektoral (Sorensen, L., 2020).

Degradasi nilai-nilai demokrasi elektoral di Indonesia setidaknya terjadi karena beberapa alasan, yaitu: tingginya biaya kampanye dan logistik serta biaya saksi, mahalnya biaya survei politik atau konsultan politik, adanya mahar politik didalam partai politik, terjadinya

politik transaksional/ politik uang, serta lemahnya penegakan hukum (Satriawan, B. H., & Angela, 2024). Beberapa alasan tersebut sejalan dengan hasil temuan Politics and Government Research Center (PolGov) and Coral Bell School of Asia Pasific Affairs di Australian National University (ANU) yang jauh waktu kebelakang sudah menyimpulkan bahwa politik di Indonesia adalah politik transaksional/ politik uang (Aspinall & Sukmajati, 2016).

Sampai saat ini permasalahan politik transaksional/ politik uang ini merupakan ancaman serius terhadap integritas demokrasi baik pada level nasional maupun lokal. Politik transaksional/ politik uang hanya akan menempatkan orang-orang yang memiliki kekuatan finansial, tanpa mempertimbangkan nilai yang dimiliki (Avis et al., 2022), serta memiliki tendensi membuka ruang untuk lahirnya figur/kandidat yang jauh dari nilai integritas dan kualitas melalui ide/kinerja yang dimiliki karena preferensi politik pemilih yang tidak lagi didasari rasionalitas melainkan hanya pertimbangan pragmatis (Satriawan, B. H., & Angela, 2024).

Saat ini demokrasi elektoral yang berproses dengan logika kekuatan modal, telah dan terus menjadikan kekuatan finansial menjadi salah satu faktor kekuatan didalam proses demokrasi elektoral. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius agar demokrasi elektoral yang seharusnya menjadi ruang ekspresi kehendak rakyat tidak terdistorsi oleh pengaruh kekuatan finansial. Memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang menjadi urgensi penting saat ini. Dimana demokrasi elektoral dapat dikatakan berhasil ketika dapat memenuhi kriteria antara lain: hadirnya kompetisi yang bersih, membuka ruang kompetisi politik gagasan dan kinerja, efektif dan efisien (Bettiza, G., & Lewis, D., 2020).

Pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 merupakan momentum penting bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk menyongsong kualitas demokrasi yang lebih baik. Konsolidasi demokrasi telah menjadi urgensi penting didalam perkembangan demokrasi elektoral di Provinsi Kalimantan Tengah terutama di Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi. Dalam penerimaannya yang paling luas, demokrasi yang terkonsolidasi adalah demokrasi yang tidak akan terdisrupsi dari berbagai gangguan (Sorensen, L., 2020).

Sebagai Ibu Kota Povinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya harus dapat menjadi benchmarking bagi daerah lainnya, bahwa Kota Palangka Raya merupakan salah satu wilayah dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah, harus diiringi dengan integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang, terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang melalui kegiatan pendidikan politik terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

Manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendidikan politik ini guna mengoptimalisasikan pencegahan atau meminimalisir terjadinya politik transaksional/ politik uang, meningkatkan partisipasi politik secara kuantitas maupun kualitas, membentuk kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara (Iskandar, D., & Marlina, N., 2019), membentuk rasionalitas pemilih, serta membuka ruang lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas melalui ide/kinerja yang dimiliki dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

2. METODE

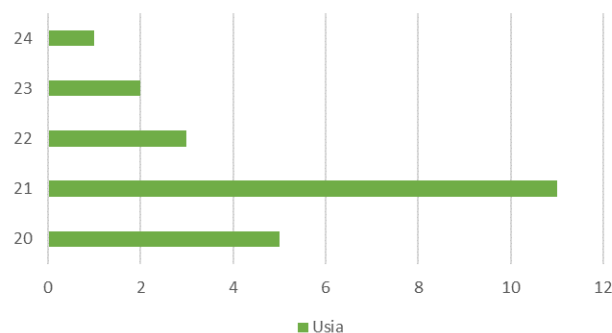
Kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat pemilih ini, dilaksanakan di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dihadiri oleh 22 orang kelompok sasaran sebagai pemilih potensional. Lokasi ini dipilih sebagai salah satu

wilayah di Kota Palangka Raya dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Kota Palangka Raya. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- Tahap persiapan, tim melakukan pengumpulan data mengenai kelompok sasaran yaitu masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah yang berada di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian berkoordinasi dengan mitra Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- Tahap pelaksanaan, tahap ini dengan melakukan kegiatan pendidikan politik kepada kelompok sasaran, terkait bagaimana memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/politik uang dan serta bagaimana membuat keputusan yang lebih cerdas dan bertanggung jawab saat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Langkah ini dilakukan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi yang mencakup pengetahuan mengenai memperkuat integritas pemilih, politik transaksional/ politik uang, rasionalitas pemilih, hak dan tanggung jawab pemilih, serta pentingnya partisipasi politik dalam pemilu;
- Tahap evaluasi, pada tahap ini dilakukan dengan tim mengamati *feedback* dari kelompok sasaran ketika proses *transfer knowledge*, ruang diskusi, serta survei setelah kegiatan dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menggunakan metode edukasi dan sosialisasi untuk memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang terutama dalam menghadapi pemilihan kepala daerah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh 22 orang kelompok sasaran sebagai pemilih potensial, yang terdiri dari 40,9% Perempuan dan 59,1% laki-laki, dengan sebaran rentang usia 20-24 tahun (Gambar 1).



Gambar 1. Sebaran Usia Kelompok Sasaran

3.1. Kegiatan 1: Memperkuat Integritas Pemilih

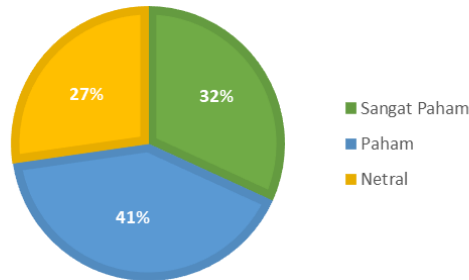
Tim menyampaikan materi kepada kelompok sasaran mengenai pentingnya integritas pemilih agar menjadi landasan bagi kelompok sasaran untuk memilih secara rasional dan bebas dari intervensi maupun tekanan dari pihak manapun agar dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas, serta meningkatkan kualitas demokrasi (Gambar 2).



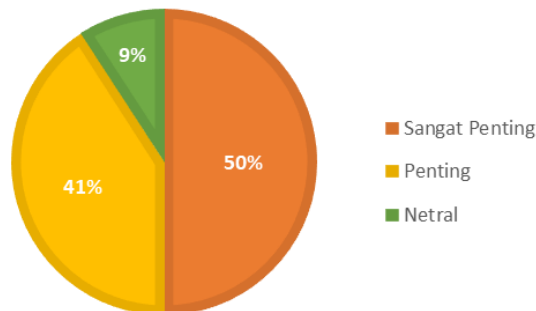
Gambar 2. Penyampaian Materi Memperkuat Integritas Pemilih

Dalam proses sosialisasi, dilakukan sesi diskusi untuk menambah pemahaman kelompok sasaran. Hasil dari kegiatan 1 adalah kelompok sasaran dapat memahami mengenai integritas pemilih dan pentingnya memperkuat integritas pemilih dalam pemilihan umum yang akan segera dilaksanakan dalam pemilihan umum kepala daerah.

Setelah kegiatan 1 berakhir, dilakukan evaluasi untuk mendapatkan gambaran pemahaman kelompok sasaran setelah sosialisasi dilaksanakan dengan menggunakan *google form*. Adapun hasilnya menunjukkan bahwa 73% dari total peserta telah memahami mengenai integritas pemilih (Gambar 3).



Gambar 3. Pemahaman Integritas Pemilih



Gambar 4. Pandangan Kelompok Sasaran Terhadap Integritas Pemilih dalam Pemilihan Umum

Evaluasi selanjutnya berkaitan tentang pemahaman kelompok sasaran terkait pandangan kelompok sasaran terhadap pentingnya memiliki integritas bagi pemilih. Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa mayoritas kelompok sasaran menyatakan bahwa integritas pemilih menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap pemilih dalam suatu pemilihan umum (Gambar 4).

3.2. Kegiatan 2: Ketahanan Terhadap Politik Transaksional

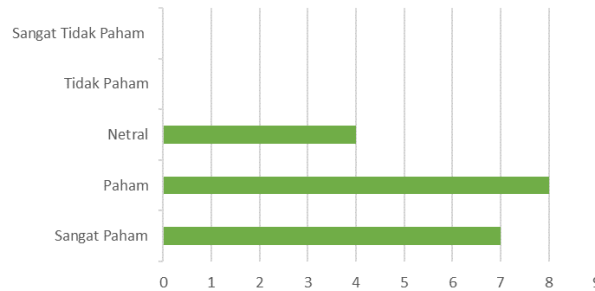
Tim menyampaikan edukasi mengenai politik transaksional dan bahayanya (Gambar 5). Praktik politik transaksional dari waktu ke waktu apapun levelnya tidak berkurang sama sekali, hal ini “terlestarikan” karena rendahnya kesadaran pemilih dan faktor sosial ekonomi yang memberikan dampak pada keputusan pemilih pada saat pemungutan suara.



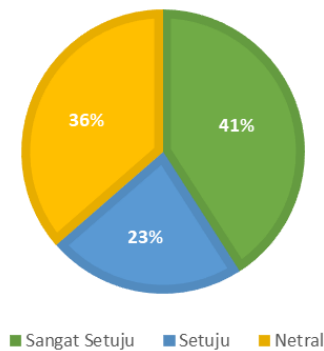
Gambar 5. Penyampaian Materi Mengenai Politik Transaksional

Dalam kegiatan kedua ini menjelaskan kepada kelompok sasaran bentuk dari politik transaksional yang selama ini berkembang. Secara umum dapat berupa pemberian uang dan atau barang untuk mendulang suara, memberikan janji-janji politik yang tidak realistis dan bahkan manipulasi informasi. Politik transaksional ini jika tidak dibendung maka akan merusak proses demokrasi, sehingga pemimpin yang dihasilkan jelas tidak kompeten. Dari hasil tersebut, maka akan menimbulkan *trusts issue* di tengah Masyarakat.

Pada kegiatan kedua juga dilakukan evaluasi setelah menyampaikan pemaparan materi, dengan menggunakan metode survey untuk mendapatkan gambaran pandangan yang dimiliki oleh kelompok sasaran setelah proses sosialisasi dilakukan. Evaluasi pertama pada kegiatan kedua ini menanyakan pemahaman mereka mengenai politik transaksional (Gambar 6).



Gambar 6. Pemahaman Kelompok Sasaran Terhadap Politik Transaksional



Gambar 7. Pemahaman Terhadap Dampak Politik Transaksional

Berdasarkan data yang diatas, setelah materi tersampaikan kepada kelompok sasaran, mayoritas peserta telah memahami politik transaksional dan bentuk-bentuknya. Selain itu lebih dari separuh peserta atau sekitar 64% peserta telah memahami dampak negatif dari politik transaksional (Gambar 7).

Secara keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang melalui kegiatan pendidikan politik terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

Dalam kegiatan ini tim juga menggunakan metode diskusi untuk memancing peserta untuk menyampaikan gagasan mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh mereka untuk menjaga integritasnya dalam memilih. Mereka menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir gerak politik transaksional, dengan menjadi agen perubahan, serta mengawasi dan melaporkan setiap pelanggaran sebagai wujud partisipasi menjaga kualitas demokrasi.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan merupakan salah satu bentuk kepedulian kelompok akademisi terhadap terjadinya disrupsi budaya politik dalam proses demokrasi elektoral yang terus berlangsung. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang di Kota Palangka Raya terutama dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

Hasil kegiatan ini adalah optimalisasi pencegahan dan meminimalisir terjadinya politik transaksional/ politik uang, meningkatkan partisipasi politik secara kuantitas maupun kualitas, membentuk kesadaran akan kewajiban sebagai warga negara, membentuk rasionalitas pemilih, serta membuka ruang lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas melalui ide/kinerja yang dimiliki dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

Secara keseluruhan kegiatan ini mendapatkan respon yang sangat positif dari kelompok sasaran yang merupakan masyarakat pemilih di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya sebagai salah satu wilayah dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbanyak di Kota Palangka Raya. Kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pemahaman kelompok sasaran tentang bagaimana memperkuat integritas pemilih dan ketahanan terhadap politik transaksional/ politik uang di Kota Palangka Raya. Selain itu kelompok sasaran menyatakan komitmennya untuk menjaga rasionalitasnya, serta menjadi agen perubahan untuk mendorong lahirnya pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas melalui ide/kinerja yang dimiliki dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemilihan Wali Kota Palangka Raya di tahun 2024.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim program dosen pendamping pemberdayaan masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Universitas Palangka Raya, LPPM Universitas Palangka Raya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya, mitra Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, serta seluruh kelompok sasaran masyarakat pemilih di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Tim program dosen pendamping pemberdayaan masyarakat juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam program dan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press - National University of Singapore. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1xxzz2>
- Avis, E., Ferraz, C., Finan, F., & Varjão, C. (2022). Money and politics: The effects of campaign spending limits on political entry and competition. *American Economic Journal: Applied Economics*, 14(4), 167-199. <https://doi.org/10.1257/app.20200296>
- Bettiza, G., & Lewis, D. (2020). Authoritarian powers and norm contestation in the liberal international order: Theorizing the power politics of ideas and identity. *Journal of Global Security Studies*, 5(4), 559-577. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogz075>
- Iskandar, D., & Marlina, N. (2019). Pendidikan Pemilih Muda Cerdas Di Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(1), 12-18. <https://core.ac.uk/download/pdf/234034293.pdf>
- Sorensen, L. (2020). Disrupting democracy: Democratization conflicts as performative struggles. *Media, War & Conflict*, 13(1), 8-26. <https://doi.org/10.1177/1750635219870225>

Satriawan, B. H., & Angela, V. F. (2024). Democracy Disrupted: High Political Costs, Transactional Politic, and Corruption. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 4(1), 59-71.
<https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.4.1.59-71>

The Economist Intelligence Unit (EIU). (2022). Democracy Index 2022.
<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2022>

Halaman Ini Dikosongkan